

SISTEM PENGAWASAN PERSEDIAAN PADA SUB DIVISI REGIONAL I PERUM BULOG MEDAN



OLEH

**NOVEL ARIANI
NIM : 998300225**



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2004**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/2/24

Judul Skripsi : **SISTEM PENGAWASAN PERSEDIAAN PADA SUB DIVISI REGIONAL I PERUM BULOG MEDAN**



Nama Mahasiswa : **NOVEL ARIANI**
No. Stambuk : **99 830 0225**
Jurusan : **Manajemen**

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Jhon Hardy, Msi


Drs. Hery Syahrial

Mengetahui

Ketua Jurusan

Dekan


Drs. H. Jhon Hardy, Msi




Drs. H. Sariandy, Msi

Tanggal lulus : 20 Maret 2004

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)12/2/24

RINGKASAN

NOVEL ARIANI, SISTEM PENGAWASAN PERSEDIAAN PADA PERUM
BULOG, SUB DIVISI REGIONAL I MEDAN.

(Drs. H. Jhon Hardy, Msi selaku pembimbing I dan Hery syahrial, SE selaku
pembimbing II)

Sub Divisi Regional I Medan merupakan badan pemerintahan non
departemen yang bertugas untuk mengendalikan harga dan mutu bahan kebutuhan
pokok berdasarkan kebijaksanaan umum pemerintah.

Perumusan masalah antara lain:

1. Mengingat luasnya daerah Sumatra Utara dan lokasi pertanian yang
berpencar- pencar, sehingga pihak pengawas dalam memantau perkembangan
hasil pertanian ditingkat produsen sangat sulit untuk dilaksanakan secara rutin.
2. Disetiap kabupaten terdapat daerah –daerah pertanian yang harus dipantau apa
bila saat panen raya.
3. Karena keterbatasan sarana dan prasarana serta jumlah personil yang terbatas
sehingga kantong-kantong produksi pertanian tersebut sulit dijangkau secara
menyeluruh.
4. Jumlah persediaan beras di gudang yang dimiliki Bulog sangat besar sehingga
harus diadakan pengawasan rutin.
5. Karena kesibukan di gudang maka pemeriksaan tidak tepat waktu.
6. Jarak antara gudang dengan gudang lain berjauhan .

Dari data – data yang di peroleh di lapangan serta teori – teori penulis pelajari
di masa perkuliahan , disini penulis mencoba memberikan saran – saran ,pada Sub
Divisi Regional I Medan mudah –mudahan saran dari penulis dapat bermanfaat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

dalam meningkatkan produksi. Saran tersebut antara lain :

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/2/24

1. Karena produksi bersifat musiman pimpinan perlu lebih meningkatkan pengawasan terhadap persediaan beras yang ada di gudang, jangan sampai stock(persediaan) yang ada sampai kehabisan sehingga pada musim paceklik tidak terjadi kekurangan beras di gudang.
2. Untuk memperkecil harga beban yang ditimbulkan oleh persediaan yaitu biaya-biaya akibat pengadaan persediaan sebaiknya pimpinan membuat suatu perencanaan yang lebih baik dengan diadakannya penjagaan yang ketat, sewaktu mengadakan pembelian diteliti jumlah kadar serta beratnya berdasarkan hitungan yang lebih ekonomis dan akurat.
3. Perlu adanya tambahan petugas pengawas yang diletakkan di bagian pergudangan sehingga pemeriksaan yang dilakukan di gudang tidak terlambat dan berjalan dengan waktu yang telah ditentukan.
4. Tersedianya sarana angkutan bagi pengawas yang mana dengan adanya sarana ini dapat memudahkan kegiatan pengawasan walaupun menempuh jarak yang jauh antara gudang yang satu dengan gudang yang lainnya.
5. Pemeriksaan Sub Divre akan lebih berperan aktif dalam pelaksanaan tugasnya agar tugas dan tanggung jawab sebagai aparat pengawasan daerah dapat menjadi input(masukan) bagi atasannya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan dan menjadikan skripsi ini dengan judul :**“SISTEM PENGAWASAN PERSEDIAAN PADA PERUM BULOG, SUB DIVISI REGIONAL I MEDAN”**. Untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi – tingginya kepada :

1. Bapak Drs. H. Zulkarnain Lubis, MS selaku rektor Universitas Medan Area Medan.
2. Bapak Drs. Syahriandy, Msi selaku dekan fakultas Ekonomi.
3. Bapak Drs.H. Jhon Hardy, Msi selaku ketua jurusan dan pembimbing I yang banyak meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dengan berbagai masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Hery Syahrial, SE selaku pembimbing II yang juga telah banyak waktunya dalam memberikan bimbingan dengan berbagai masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Pimpinan Sub Divisi Regional I Medan serta seluruh karyawan yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data – data yang di perlukan untuk penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh staf pengajar Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama ini.
7. Seluruh teman – teman khususnya teman – teman dekatku yang telah memberikan dorongan berupa kritik dan saran kepada penulis selama masa perkuliahan dan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Ayahanda Syamsul Asmi dan Ibunda Martini, kakak, abang, adik serta saudara – saudara yang banyak memberikan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi rekan sekalian.



DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A...Alasan Pemilihan Judul.....	1
B. Perumusan Masalah	2
C. Hipotesis	3
D. Luas Dan Tujuan Penelitian	3
E. Metode Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data	4
F. Metode Analisis	5
BAB II : LANDASAN TEORITIS	
A. Pengertian Dan Tujuan Pengawasan Persediaan	6
B. Jenis – Jenis Persediaan.....	11
C. Model Pengawasan Persediaan.....	15
D. Proses Pengawasan Persediaan.....	22



BAB III :SUB DIVISI REGIONAL I MEDAN

A. Gambaran Umum Perusahaan 26

B. Jenis- Jenis Pengaturan Umum Persediaan..... 35

C. Model Pengawasan Persediaan..... 39

D. Proses Pengawasan Persediaan..... 43

E. Hubungan Pengawasan Dengan Persediaan..... 46

F. Hambatan-hambatan Yang Dihadapi 48

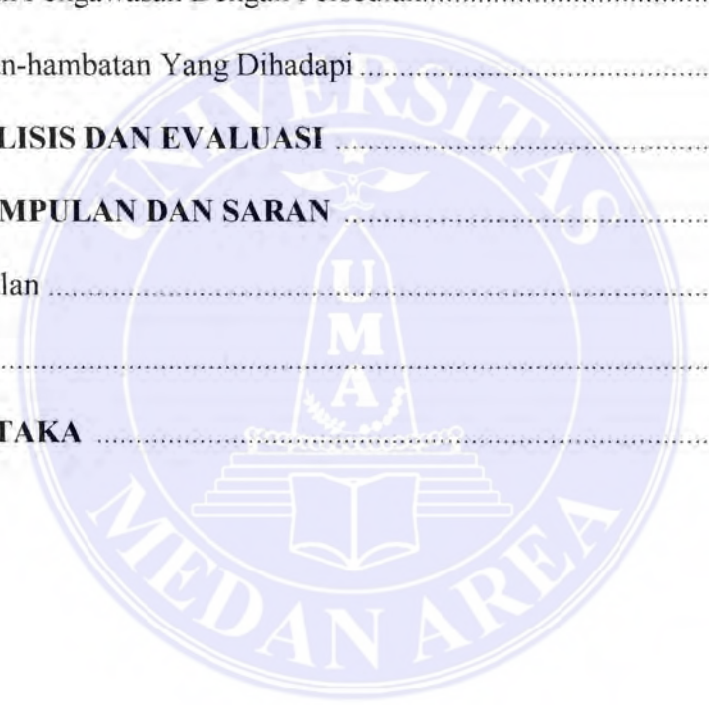
BAB IV : ANALISIS DAN EVALUASI 49

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 55

A. Kesimpulan 55

B. Saran 56

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR :	Hal
I. Struktur Organisasi Sub Divisi Regional I Medan	34
II. Tumpukan Kunci Delapan	37
III. Tumpukan Bata Mati.....	38



BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Kebutuhan pokok secara universal menduduki urutan pertama dalam hirarki kebutuhan manusia yang disebut sebagai kebutuhan fisiologi. Ada berbagai macam kebutuhan pokok, tetapi yang terutama adalah kebutuhan pokok, serevia atau biji-bijian yang merupakan sumber kalori. Di Indonesia beras adalah salah satu kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Karena beras merupakan salah satu pokok, maka aparat pemerintah diminta untuk membantu melakukan pengawasan baik internal maupun external.

Menurut Bulog pengawasan internal adalah “ Pengawasan yang dilakukan staf dolog yang dalam ini oleh unit inspektur pembantu bidang pengawasan (IRTU) dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun realisasi pemenuhan kebutuhan persediaan untuk mengetahui secara dini penyebab terjadinya tingkat persediaan yang tidak ekonomis, untuk selanjutnya diadakan penyesuaian, sedangkan pengawasan external adalah pengawasan yang dilakukan oleh satuan pengawasan diluar Dolog antara lain oleh Bulog dan BPKP yang ditujukan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tingkat persediaan secara ekonomis penggunaan dana maupun faktor-faktor lainnya”.

Pengawasan terhadap penyediaan beras bertujuan untuk menentukan tingkat kesediaan yang ekonomis untuk mendukung terpenuhnya kebutuhan

pokok masyarakat. Hal ini didasari apabila persediaan terlalu besar, maka akan mengakibatkan timbulnya kerugian berupa biaya perawatan/penyimpanan dan kemungkinan akan turunnya kualitas beras. Di sisi lain jumlah persediaan yang rendah akan mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat dan kemungkinan harga beras naik.

Beras yang tersedia digudang biasanya tersimpan lama, sehingga kualitas menurun, maka pihak pelaksana dalam hal ini inspektur / pengawas melihat apakah ada serangan hama atau tidak. Kalau ada maka segera dilakukan usaha preventif.

Dari uraian tersebut di atas peran pengawasan dalam penyediaan beras sangat diperlukan. Untuk itu penulis memilih Depot Logistik sebagai objek penelitian dimana Depot Logistik sebagai badan pemerintah non departemen yang bertugas untuk mengendalikan harga dan mutu bahan kebutuhan pokok beras berdasarkan kebijaksanaan umum pemerintah dan dengan alasan ini pula penulis memilih judul :

“SISTEM PENGAWASAN PERSEDIAAN PADA SUB DIVISI REGIONAL I MEDAN”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan alasan pemilihan judul, maka penulis membuat perumusan masalah , yaitu :

- a. Bagaimana sistem pengawasan persediaan pada Sub Divisi Regional I Medan.

- b. Bagaimana sistem pengawasan persediaan yang dilakukan terhadap kualitas persediaan Sub Divisi Regional I Medan

C. Hipotesis

Hipotesis adalah : “Perumusan jawaban sementara terhadap suatu masalah yang dimaksud sebagai jawaban sementara dalam penyelidikan untuk memperoleh jawaban yang sebenarnya”.¹

Berdasarkan permasalahan yang dibuat, penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut.

- a. Sistem pengawasan persediaan sudah dilakukan dengan baik dan benar.
- b. Sistem pengawasan persediaan yang dilakukan belum menjamin kualitas persediaan yang disimpan digudang.

D. Luas dan Tujuan Penelitian

Untuk lebih memfokuskan penulisan ini, maka lingkup penelitian dibatasi pada sistem pengawasan persediaan yang dikaitkan dengan kualitas persediaan pada Sub Divisi Regional I Medan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- b. Untuk mengetahui sistem pengawasan persediaan pada Sub Divisi Regional I Medan.

¹⁾ Winarto Sukrakhmad, **Pengantar penelitian dasar, metode dan teknik**, edisi VII, penerbit tarsito, Bandung, 1995, hal.39.

- c. Untuk mengetahui sistem pengawasan persediaan terhadap kualitas persediaan yang disimpan di gudang.
- d. Untuk mengetahui jumlah stock yang di simpan di Sub Divisi Regional I Medan.

E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode, yakni :

a. Penelitian kepustakaan (Library Research)

Yaitu cara penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah pangan utamanya tentang perberasan dan majalah-majalah pangan lainnya. Data diperoleh adalah data sekunder.

b. Penelitian Lapangan (Field Reseach)

Yaitu penelitian yang dilakukan langsung pada Sub Divisi Regional I Medan guna memperoleh data Primer.

Adapun teknik pengumpulan data yang di gambarkan adalah sebagai berikut:

a. Pengamatan (Observation)

Dalam hal ini penulis mengamati langsung objek yang diteliti dilapangan guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi atau posisi objek bersangkutan untuk selanjutnya diadakan pencatatan seperlunya atas pengamatan tersebut.

b. Wawancara (Interview)

Yaitu tanya jawab dilakukan dengan pejabat yang berwenang untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan.

c. Daftar pertanyaan (Questionnaire)

Yaitu untuk memperlancar proses wawancara guna melengkapi data yang diinginkan, maka terlebih dahulu disiapkan daftar pertanyaan, untuk selanjutnya dibagikan kepada responden dalam perusahaan tersebut untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.

F. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Metode Analisis Deskriptif

Yaitu metode cara mengumpulkan data yang dibutuhkan kemudian diklasifikasikan, dianalisis serta diinterpretasikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti.

b. Metode Analisis Induktif

Yaitu metode pendekatan tak langsung, dimana bukti-bukti muncul terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan ide pokok.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Pengawasan dan Tujuan Pengawasan Persediaan

Pengawasan mempunyai beberapa pengertian, yaitu memperbandingkan bukti dari seseorang dengan orang lain didalam penggunaanya dan pelaksanaannya. Didalam arti yang sempit pengawasan disamakan dengan internal check yang merupakan prosedur-prosedur mekanis untuk memeriksa kebenaran dari data administrasi seperti halnya mencocokkan penjumlahan mendatar (horizontal) dengan penjumlahan melurus (vertikal).

Tujuan utama dari pengawasan bukan untuk mencela pekerjaan yang salah satu bukan semata-mata mencari kesalahan, akan tetapi pengawasan bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana, ketentuan, peraturan pemerintah dan instruksi serta kebijaksanaan yang ditetapkan. Dengan demikian semua hambatan dan tantangan-tantangan dapat diketahui dan direncanakan untuk mengatasinya dalam pengawasan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pengertian pengawasan diantaranya adalah :

“Pengawasan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang selalu dilakukan, menilainya dan mengoreksi bila perlu, dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”²⁾

²⁾ M. Manulang, **Dasar-dasar Manajemen**, Edisi di Perbaharui, Ghalia Indonesia, Jakarta,

1990, hal 173

Sedangkan menurut Alex S. Nitisemito, Pengawasan dapat diartikan sebagai berikut :

“Pengawasan ialah suatu usaha untuk dapat mencegah penyimpangan dari pada rencana-rencana, instruksi-instruksi, saran-saran dan sebagainya yang ditetapkan atau pengawasan ialah suatu yang dilakukan untuk dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan kesalahan dari pada instruksi yang telah ditetapkan”.³⁾

Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk mengetahui hasil-hasil pelaksanaan terutama yang berkaitan dengan usaha untuk mencegah terjadinya penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan terhadap aspek-aspek kegiatan perusahaan tersebut kemudian dievaluasi, lalu melaksanakan tindakan pengoreksian terhadap temuan-temuan pengawasan dengan rencana-rencana yang telah diterapkan perusahaan.

Tujuan utama dari pengawasan persediaan adalah agar pelaksanaan kegiatan itu sesuai dengan standarnya. Namun kalau dirinci lebih lanjut, maka tujuan pengawasan adalah :

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaannya itu tidak mengalami kesulitan-kesulitan yang berarti.
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaannya cukup efisien.
3. Untuk mengetahui apa penyebabnya apabila terjadi penyimpangan.
4. Untuk mencari pemecahannya, sehingga pelaksanaan dapat sesuai dengan standarnya.⁴⁾

Dari batasan diatas jelas bahwa tujuan utama dari pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-

³⁾ Alex S. Nitisemito, **Manajemen**, Penerbit Arena Ilmu, Jakarta, 1990, hal.137

⁴⁾ Ibnu Syamsu S.U, **Pokok-pokok Organisasi Manajemen**, Cetakan III, Edisi Revisi, Balai

Aksara Jakarta, 1995, hal.85

benar merealisasikan tujuan utama tersebut maka pengawasan pada taraf-taraf permulaan bertujuan didalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan pelaksanaan yang bermasalah dan kelemahan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya atau pencegahan sehingga masalah tersebut dapat ditekan sekecil mungkin baik pada waktu itu ataupun pada waktu yang akan datang. Akan tetapi lebih baik lagi perbaikan akan kesalahan-kesalahan atau kelemahan-kelemahan dapat dilaksanakan secepat mungkin. Dengan cepatnya tindakan pengawasan dilakukan maka kesalahan yang dapat berakibat fatal bagi perusahaan akan terhindar dari kerugian yang lebih besar.

“Pengawasan adalah usaha sistematis untuk menerapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merangsang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukup penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan digunakan dengan cara yang paling efektif dalam pencapaian tujuan perusahaan”.⁵⁾

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas, maka pengawasan dapat diartikan bahwa dengan adanya pengawasan yang baik dan efektif dalam pelaksanaan tugas atau kegiatan akan menolong personil atau orang-orang untuk mematuhi kebijaksanaan-kebijaksanaan atau rencana perusahaan yang telah ditetapkan pada

⁵⁾ Robert Z. Mockler, **The Management Control**, Edisi Khusus, Penerbit CV. Amanda, Yogyakarta, 1993, hal 79

batas yang minimal, kemudian tindakan koreksi arah memperlancar pencapaian tujuan.

Pengawasan yang diterapkan ini sebenarnya adalah untuk disiplin kerja dan kejujuran yang dimiliki oleh pegawai atau tenaga kerja serta menilai kesungguhan dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Pengawasan yang diterapkan dalam perusahaan bukan hanya berlaku kepada pegawai biasa atau pegawai rendah saja, tetapi juga berlaku kepada pimpinan/ kepala bagian atau pejabat tingkat atas lainnya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengawasan berlaku untuk semua pegawai yang ikut mengelola perusahaan tanpa terkecuali dalam lingkungan perusahaan.

Dari berbagai batasan diatas, bahwa tujuan utama dari pengawasan, adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisir tujuan utama tersebut maka pengawasan pada taraf-taraf permulaan bertujuan di dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan pelaksanaan yang bermasalah dan kelemahan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya atau pencegahan sehingga masalah tersebut dapat ditekan sekecil mungkin, baik pada waktu itu ataupun pada waktu yang akan datang. Akan tetapi lebih baik lagi perbaikan akan kesalahan-kesalahan atau kelemahan-kelemahan dapat dilaksanakan secepat mungkin. Dengan cepatnya tindakan pengawasan dilakukan, maka kesalahan

yang dapat berakibat fatal bagi perusahaan akan terhindar. Sehingga perusahaan terhindar dari kerugian yang terlalu besar.

Untuk lebih jelasnya melengkapinya daripada definisi pengawasan yang berhubungan dengan judul Sistem Pengawasan Persediaan, maka yang lebih ditekankan adalah masalah Pengawasan Persediaan. Alasan yang sering menjadi sebab kegagalan perusahaan dalam pengelolaan persediaan adalah terlampau besar/kecilnya persediaan yang ada di gudang penyimpanan.

Adanya kelebihan persediaan akan berakibat pada biaya pemeliharaan dalam jumlah yang besara pula. Sebaliknya dengan jumlah persediaan yang sedikit tentunya akan mengganggu kegiatan dalam proses produksi. Oleh karena itu sistem pengawasan persediaan harus dijalankan sebagaimana mestinya.

Pengawasan persediaan yang dijalankan adalah untuk memelihara terdapatnya keseimbangan antara kerugian-kerugian serta penghematan terhadap tingkat persediaan tertentu, dan besarnya biaya dan modal yang dibutuhkan untuk mengadakan persediaan.

Tujuan pengawasan persediaan secara terperinci dapat dinyatakan sebagai usaha untuk :

1. Menjaga jangan samapai perusahaan kehabisan persediaan sehingga dapat mengakibatkan terhentinya kegiatan produksi.
2. Menjaga agar pembentukan persediaan oleh perusahaan tidak terlalu besar atau berlebihan sehingga biaya-biaya yang timbul dari persediaan tidak terlalu besar.
3. Menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari karena akan berakibat biaya pemesanan menjadi besar.⁶⁾

⁶⁾ T. Hani Handoko, **Manajemen Produksi**, Edisi III, BPFE-UGM Yogyakarta, 1992, hal. 187

Dari keterangan diatas dapatlah dinyatakan bahwa tujuan pengawasan persediaan untuk memperoleh kualitas dan jumlah yang tepat dari bahan-bahan yang tersedia apda waktu yang dibutuhkan dengan biaya yang minimum.

B. Jenis-Jenis Persediaan

Dalam hal pengawasan persediaan yang dijalankan oleh suatu perusahaan sudah tentu mempunyai tujuan tertentu. Tujuan dari pengawasan yaitu untuk menghindari kekurangan materil atau barang yang dipakai, dengan tidak terlalu banyak modal yang diinvestasikan ke dalamnya. Hal ini menggambarkan adanya prinsip keseimbangan jumlah persediaan tidak terlalu kecil dan jumlah persediaan tidak terlalu besar, karena hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perusahaan.

Menurut Drs. Sofyan Assouri dalam bukunya “Manajemen Produksi” menyebutkan tentang defenisi persediaan.

“Persediaan sebagai suatu aktiva yang meliputi barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode yang normal atau persediaan yang menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi”⁷⁾

Sedangkan menurut T. Hani Handoko yang memberikan pengertian persediaan adalah sebagai berikut :

⁷⁾ Sofyan Assouri, **Manajemen Produksi**, Edisi ke tiga, LPFE-UI, Jakarta, 1993

“Persediaan adalah suatu istilah umum yang menunjukkan segala sesuatu atau sumber daya-daya organisasi yang disimpan dalam antisipasi terhadap pemenuhan permintaan”.⁸⁾

Bagi perusahaan dagang, persediaan merupakan barang dagang yang dimiliki dengan tujuan dapat dijual kembali. Sedangkan bagi perusahaan industri, persediaan terdiri dari bahan yang dimiliki perusahaan dengan tujuan produksi yang setelah di proses di jual kembali.

Pada dasarnya persediaan diadakan untuk mempermudah atau memperlancar jalannya operasi perusahaan yang harus dilakukan secara terus-menerus untuk memproduksi barang-barang yang selanjutnya disampaikan kepada konsumen.

Persediaan dapat dikendalikan secara efektif melalui sistem persediaan. Sistem yang dimaksud adalah merupakan suatu rangkaian kebijaksanaan dalam memonitor tingkat persediaan yang paling optimal dan tidak mengganggu kegiatan operasi perusahaan.

Sedangkan persediaan yang diadakan mulai dari yang berbentuk bahan mentah sampai dengan barang jadi, yang berfungsi untuk :

1. Menghilangkan resiko keterlambatan datangnya barang atau bahan-bahan yang dibutuhkan oleh perusahaan.
2. Menghilangkan resiko dari material yang di pesan tidak baik sehingga harus dikembalikan.
3. Untuk memupuk bahan-bahan yang dihasilkan secara musiman sehingga dapat digunakan bila bahan itu tidak ada dalam perusahaan.
4. Mempertahankan stabilitas operasi perusahaan dan menjamin kelancaran arus produksi.

⁸⁾ T. Hani Handoko, **Dasar-dasar Manajemen Produksi dan Opsinya**, Edisi III BPFE-

UGM, Yogyakarta, 1992, hal 333

5. Mencapai penggunaan mesin yang optimal.
6. Memberikan pelayanan servis kepada langganan dengan sebaik-baiknya.
7. Membuat pengadaan atau produksi yang tidak perlu sesuai dengan penggunaan atau penjualan.”⁹⁾

Dari keterangan di atas dapatlah diketahui betapa pentingnya persediaan bagi suatu perusahaan, karena dengan cukupnya persediaan memungkinkan terlaksananya operasi dengan lancar.

Menurut jenisnya persediaan dapat dibedakan atas :

1. Persediaan Pada Perusahaan Dagang
2. Persediaan Pada Perusahaan Produksi ¹⁰⁾

Ad. 1. Persediaan Pada Perusahaan Dagang

Persediaan ini sering disebut dengan Merchandise Inventory, dimana perusahaan hanya memberi dan menjual barang tanpa mengadakan perubahan yang prinsipil terhadap barang tersebut baik bentuk maupun manfaatnya.

Menurut Bambang Riyanto :

“Merchandise Inventory merupakan persediaan barang yang selalu dalam perputaran yang selalu dibeli dan dijual di dalam perusahaan tersebut yang mengakibatkan perubahan bentuk dari barang yang bersangkutan.”

Ad. 2. Persediaan pada perusahaan produksi (Pabrik)

Ini dapat dikategorikan atas :

- a. Persediaan bahan mentah (raw material inventory)

⁹⁾ Sofyan Assoury, OP. CIT, hal. 177

¹⁰⁾ Bambang Riyanto, **Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan**, Edisi Keempat, Yayasan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1995, Hal 69

Persediaan bahan mentah/baku adalah persediaan dari barang-barang yang berwujud yang digunakan dalam proses produksi, barang-barang yang dapat diperoleh dari sumber alam ataupun dibeli dari perusahaan yang menghasilkan bahan baku bagi perusahaan yang menggunakannya.

- b. Persediaan Barang dalam Proses/ Barang setengah jadi (Work in Process/ goods in process inventory).

Persediaan barang dalam proses/ barang setengah jadi adalah bahan yang baru selesai sebahagian atau dikerjakan lebih lanjut agar dapat dijual atau dipergunakan.

- c. Persediaan barang jadi (Finished Good Inventory)

Persediaan barang jadi adalah hasil akhir dari proses atau barang yang telah selesai diproses atau sudah selesai diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual ke konsumen.

Persediaan barang merupakan elemen yang sangat penting bagi perusahaan. Dimana persediaan mempunyai pengaruh yang langsung terhadap laba. Persediaan barang yang terlalu besar akan menyebabkan tingginya investasi, dan sebaliknya persediaan barang yang tidak mencukupi dapat mengganggu kegiatan operasi. Karena itu perlu adanya pengawasan terhadap persediaan, agar tingginya tingkat persediaan dapat di jaga dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian operasi perusahaan dapat berjalan lancar dan biaya yang dikeluarkan berada pada tingkat yang serendah-serendahnya.

Untuk dapat mengatur tersedianya suatu tingkat persediaan yang optimum yang dapat memenuhi kebutuhan bahan-bahan dalam jumlah, mutu dan pada waktu yang tepat serta jumlah biaya yang rendah seperti yang diharapkan maka diperlukan suatu sistem pengawasan persediaan yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Terdapatnya gudang yang luas dan teratur dengan pengaturan tempat bahan/ barang yang tetap dan identifikasi bahan/ barang yang tertentu.
2. Sentralisasi kekuasaan dan tanggung jawab pada satu orang yang dapat dipercaya terutama penjaga gudang.
3. Suatu sistem pencatatan dan pemerintahan atas penerimaan bahan/ barang.
4. Pengawasan mutlak atas pengeluaran barang/ bahan.
5. Pencatatan yang cukup teliti yang menunjukkan jumlah yang di pesan, yang dikeluarkan dan yang tersedia dalam gudang.
6. Pemeriksaan fisik bahan/ barang yang ada dalam persediaan secara langsung.
7. Perencanaan untuk menggantikan barang-barang yang telah dikeluarkan, barang-barang yang telah lama dalam gudang barang-barang yang telah usang dan ketinggalan zaman.
8. Pengecekan untuk menjamin untuk dapat efektifnya kegiatan rutin.¹¹⁾

C. Model Pengawasan Persediaan

Menurut Freddy Rangkuti dalam bukunya Manajemen Persediaan mengatakan bahwa model pengawasan persediaan dapat dibedakan menjadi :

1. Model Pengawasan persediaan dengan adanya kebutuhan tetap.
2. Model dengan adanya stock out.
3. Model dengan adanya kapasitas lebih.
4. Model dengan masa tenggang.
5. Model dengan adanya kebutuhan tidak tetap.
6. Model dengan adanya potongan harga.
7. Model dengan asumsi aliran produk kontinu.¹²⁾

¹¹⁾ Sofyan Ausaury, *Op-cit*, Hal. 185

¹²⁾ Freddy Rangkuti, **Manajemen Persediaan**, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Ad. 1. Model Pengawasan Persediaan Dengan Adanya Kebutuhan Tetap

Pengawasan persediaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang dapat dipecahkan dengan menerapkan metode kuantitatif. Konsep ini dapat diterapkan baik untuk industri skala kecil maupun industri skala besar. Dengan demikian dengan menganalisis secara kuantitatif, proses pengambilan keputusan dapat dipilih secara tepat sekalipun di dalam perusahaan yang telah dikelola dengan baik.

Model yang diterapkan berikut ini dapat dilaksanakan apabila kebutuhan-kebutuhan permintaan dimasa yang akan datang memiliki jumlah yang konstan dan relatif memiliki fluktuasi perubahan yang sangat kecil.

Ad. 2. Model Dengan Adanya Stock Out

Apabila jumlah permintaan atau kebutuhan lebih besar dari tingkat persediaan yang ada, maka akan terjadi kekurangan persediaan atau biasa disebut dengan "out stock".

Pada situasi terjadinya kekurangan persediaan, seseorang pengusaha akan menghadapi dua kemungkinan yaitu :

- a. Permintaan akan dibatalkan sama sekali.
- b. Barang yang masih kurang akan dipenuhi kemudian.

Kemungkinan pertama jelas tidak akan dilakukan oleh seorang pengusaha yang ingin maju, sebab apabila hal ini dilakukan maka citra perusahaan tersebut akan hancur, dan akan kehilangan pelanggan untuk selama-lamanya.

Satu-satunya jalan adalah dengan cara mengadakan perjajian, bahwa barang yang tidak dapat dipenuhi saat ini akan dikirim kemudian. Dengan demikian, barang yang masih kurang akan dipenuhi pada putaran produksi berikutnya, tetapi perusahaan tersebut akan makin menderita kehilangan biaya.

Ad. 3. Model Dengan Adanya Kapasitas Lebih

Kapasitas lebih dalam persediaan merupakan stok atau persediaan yang disimpan akibat tidak seluruhnya dapat diserap oleh pasar, misalnya dalam suatu perusahaan, produksi berjalan terus secara kontinue dengan laju P satuan setiap hari. Sedangkan jumlah permintaan adalah sebesar D satuan setiap hari, maka stok dalam gudang akan sama dengan $(P-D)$ satuan setiap hari. Selanjutnya kalau tiba-tiba produksi berhenti pada suatu saat, maka persediaan akan berkurang dengan kecepatan sebesar D setiap hari.

Ad. 4. Model Dengan Adanya Masa Tenggang

Masa tenggang diartikan sebagai waktu penundaan antara saat pemesanan dengan saat penerimaan. Yang perlu diingat adalah bahwa jumlah pesanan optimal tidak terpengaruh dengan adanya masa tenggang.

Yang menjadi persoalan adalah menentukan jumlah persediaan yang minimum pada saat mana persediaan sudah harus diajukan kembali, untuk menghindari terjadinya kekosongandalam stok dan sedemikian rupa sehingga barang pengganti sudah tiba tepat pada awal putaran berikutnya.

Ad. 5. Model Dengan Kebutuhan Tidak Tetap

Masalah persediaan ini akan dijelaskan dengan kondisi kebutuhan yang sifatnya tidak tetap (probabilitas). Model ini dapat dikategorikan single atau multi-period model.

Pada multi-period model, distribusi dari permintaan dapat berbentuk stationary atau nonstationary. Pada multi period model dengan permintaan berbentuk stationary dapat dengan mudah dikembangkan menjadi model berbentuk nonstationary.

Kriteria dasar pengambilan keputusannya adalah dengan meminimalkan biaya yang diharapkan (memaksimalkan laba). Untuk itu model pengawasan persediaannya dilakukan secara terus menerus (continous review model).

Model ini memperkenalkan model probabilistik dimana persediaan dipantau secara terus menerus dan jumlah pemesanan dilaksanakan pada saat tingkat persediaan mencapai titik tertentu.

Ad. 6. Model Dengan Adanya Potongan Harga

Potongan harga merupakan suatu kebijakan dimana harga beli perunitnya akan lebih murah dibandingkan dengan harga beli perunit rata-rata. Hal ini sangat dimungkinkan karena jumlah penduduk yang dibeli telah mencapai batasan pembeli minimum tertentu.

Pada umumnya harga beli perunit menurun sebesar kenaikan jumlah pembelian, disebabkan karena adanya prinsip skala ekonomis dalam bidang produksi maupun distribusi.

Apabila permintaan telah diketahui jumlahnya, maka dengan sendirinya dalam persediaan tidak terjadi kehabisan stok (pengiriman dilaksanakan secara teratur), sehingga harga beliperunitnya menjadi variasi tergantung pada jumlah barang yang dibeli. Kondisi seperti ini disebut dengan “model dengan potongan harga”.

Ad. 7. Model Dengan Asumsi Aliran Produk Kontinu

Selain menerima order pada saat yang bersamaan, perusahaan juga dapat menghasilkan produk secara kontinu. Dengan demikian produk yang dihasilkan dapat dikirim ke persediaan dalam kelompok.

Pengawasan penting untuk menjaga agar tidak terjadi kekurangan ataupun kelebihan persediaan. Untuk menghindari besar kecilnya persediaan ini maka suatu kebijaksanaan penilaian terhadap persediaan dengan menggunakan beberapa metode. Beberapa metode yang dapat digunakan terhadap tingkat persediaan menurut Agus Ahyari antara lain :

1. Identifikasi Khusus
2. Rata-Rata Sederhana
3. Rata-Rata Tertimbang
4. Rata-Rata Bergerak
5. Masuk Terakhir Keluar Pertama (LIPO)
6. Masuk Pertama Keluar Pertama (FIFO)
7. Persediaan Dasar
8. Harga Beli Atau Harga Dasar Terendah
9. Harga Standart¹³⁾

¹³⁾ Agus Ahyari, **Manajemen Produksi**, Edisi Ketiga BPFE-UGM, Yogyakarta, 1993, Hal. 130

Ad.1 Identifikasi Khusus

Metode ini didasarkan pada anggapan bahwa arus barang harus sama dengan arus biaya, maka perlu dipisahkan tiap-tiap jenis bahan berikut harganya masing-masing bahan dibuat kartu persediaan tersendiri sehingga harganya dapat diketahui.

Ad.2 Rata-Rata Sederhana

Bahan yang dipakai untuk proses produksi dibebankan dengan harga rata-rata. Penentuan harga ini dilakukan dengan cara membagikan dengan jumlah harga. Pembelian per pesanan dengan kuantitas pembelian dalam kali. Persediaan akhir adalah sisa dari pemakaian bahan dengan harga rata-rata tadi.

Ad.3 Rata-Rata Tertimbang

Metode ini disebut juga dengan Weighted Average Metode, dimana pemakaian bahan didasarkan dengan harga rata-rata. Penentuan harga ini dilakukan dengan cara membagikan jumlah rupiah bahan yang dibeli dengan kuantitas bahan yang dibeli. Persediaan akhir adalah sisa dari pemakaian barang dikali dengan harga rata-ratanya.

Ad.4 Rata-Rata Bergerak

Metode ini disebut juga dengan Moving Average Method dimana bila terjadi penambahan bahan maka dihitung terus rata-rata per unit yang baru. Caranya adalah dengan menambahkan harga per pesanan dari persediaan sebelumnya dengan harga per pesanan yang baru dibagikan kuantitas pesanan dalam kali.

Ad.5 Masuk Pertama Keluar Pertama (LIFO)

Nilai pemakaian bahan yang didasarkan pada bahan per pesanan yang terakhir dibeli dan diikuti dengan harga bahan per pesanan yang masuk sebelumnya. Persediaan akhir di bebaskan dengan harga per pesanan pembelian pertama dan berikutnya sisa bahan masih berlebih dari yang pertama di beli.

Ad.6 Masuk Pertama Keluar Pertama (FIFO)

Nilai pemakaian bahan didasarkan pada harga bahan per pesanan yang pertama dibeli dan didikuti denagan harag pesanan pembelian selanjutnya. Sedangkan persediaan akhir dibebaskan pada per pesanan pembelian terakhir dan harga per pesanan yang masuk sebelumnya jika sisa masih berlebih dari pembelian akhir.

Ad. 7 Persediaan Dasar

Pada metode ini perusahaan menentukan sejumlah persediaan dasar dengan harga dasar pula. Selisih jumlah unit persediaan dasar dengan jumlah unit persediaan dasar dengan jumlah unit persediaan akhir diperhitungkan dengan harga pasar yang berlaku pada saat itu.

Ad. 8 Harga Beli Atau Harga Dasar Terakhir

Menurut metode ini, persediaan akhir akan dinilai atas harga beli atau harga pasar yang terendah pada saat perhitungan, dimana harga yang terendah ini dapat dilihat pada pembelian sebelumnya.

Ad. 9. Harga Standart

Menurut metode ini, suatu perusahaan terlebih dahulu sudah menetapkan harga standart. Oleh karena itu persediaan akhir akan dinilai dengan biaya standart pula. Penetapan biaya ini biasanya mengikuti perkembangan harga di pasar.

D. Proses Pengawasan persediaan

Proses pengawasan persediaan adalah merupakan suatu proses yang dalam pelaksanaannya harus melalui urutan-urutan yang mudah di dalam pelaksanaannya, untuk lebih jelasnya urutan-urutan yang harus dilalui dalam pelaksanaan pengawasan untuk mencapai tujuan ialah :

1. Menetapkan alat pengukur atau satandard
2. Mengadakan penilaian atau evaluasi
3. Mengadakan tindakan perbuatan¹⁴⁾

Ad.1 Menetapkan alat ukur standard

Menetapkan alat ukur standard adalah untuk memudahkan dalam melaksanakan pengawasan, sebab dengan adanya satndard maka pimpinan dapat menilai ada tidaknya pennyimpangan. Alat penilai atau standard pengukur adalah model yang ditetapkan untuk menilai kuantitas dan kualitas. Alat penilai itu harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan melaksanakan pekerjaannya. Standard ini dapat digolongkan atas 3 (tiga) bahagian yaitu :

- a. Standard dalam bentuk Physik, meliputi :
 1. Kuantitas hasil produksi
 2. Kualitas hasil produksi
 3. Waktu
- b. Standard dalam bentuk uang, meliputi :
 1. Standard biaya

¹⁴⁾ Agus Ahvari, Op-Cit. Hal. 184

2. Standard penghasilan
 3. Standard investasi
- c. Standard intangible yaitu suatu pengukuran untuk pekerjaan yang sulit untuk diukur baik fisik maupun uang atau materil.

Ad.2 Mengadakan Penilaian atau Evaluasi

Setelah standard ditetapkan, langkah selanjutnya adalah mengadakan penilaian terhadap hasil-hasil yang diperoleh sehingga dapat diketahui perbedaan hasil yang ditetapkan semula dengan hasil yang realisir. Juga akan diketahui apakah hasil yang dicapai sudah sesuai dengan hasil yang diharapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan alat pengukur dengan melihat hasil kerja bawahan.

Dengan demikian yang terpenting dalam hal ini adalah mengidentifikasi apa sebab terjadinya penyimpangan-penyimpangan, dan berdasarkan hal tersebut dapat ditetapkan tindakan yang di perintahkan.

Ad.3 Mengadakan Tindakan Perbaikan

Tindakan perbaikan diadakan jika dalam hal pelaksanaannya tidak sesuai lagi dengan rencana semula. Seseorang yang melaksanakan tindakan perbaikan ini harus benar-benar berani dan jujur dalam bertindak baik terhadap pimpinan atau bawahan, sehingga setiap anggota-anggota organisasi tidak merasa ada perlakuan yang tidak adil terhadap sesamanya.

Di dalam kelanjutan usaha suatu perusahaan pihak pimpinan harus memepertahankan faktor-faktor apa yang diperlukan agar pengawasan dapat

dilakukan dengan efektif. Untuk itu diperlukan berbagai proses atau cara mengawasinya adalah sebagai berikut :

1. Peninjauan pribadi
2. Interview/ lisan
3. Laporan tertulis
4. Laporan dan pengawasan terhadap hal-hal bersifat istimewa

Ad.1 Peninjauan Pribadi

Peninjauan pribadi adalah mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi atau langsung ke lapangan sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan. Pelaksanaan pengawasan dengan cara ini mempunyai kelemahan dan prasangka yang negatif dari bawahan, hal ini disebabkan karena bisa menimbulkan kesan pada bawahan bahwa mereka kurang di percaya oleh pimpinan dalam melaksanakan pekerjaan. Akibatnya bisa menimbulkan perasaan bersalah dalam setiap kegiatan yang dilakukan dan ini akan menghambat kelancaran tugasnya.

Ad.2 Interview/ Lisan

Seorang atasan hanya menerima laporan secara lisan dari bawahan tentang kegiatan bawahannya, dengan demikian manager akan memberi petunjuk tentang bagaimana pelaksanaan yang sebenarnya. Wawancara ini sangat berguna karena dengan cara ini kedua belah pihak aktif, bawahan memberikan laporan lisan dengan hasil pekerjaannya dan atasan dapat menanyakan lebih lanjut untuk memperoleh fakta-fakta yang diperlukan.

Ad.3 Laporan Tertulis

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/2/24

Laporan tertulis adalah merupakan pertanggung-jawaban bawahan kepada atasan atas hasil kerjanya apakah sesuai dengan instruksi dan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dengan cara tertulis. Dengan cara ini atasan dapat menilai semua pekerjaan yang di delegasikan kepadanya. Kelemahan laporan ini ialah pimpinan sulit menentukan mana yang berupa kenyataan dan mana yang berupa pendapat, dan keuntungan dari pengawasan ini adalah mudah untuk menyusun rencana berikutnya.

Ad.4 Laporan dan Pengawasan Kepada Hal-Hal yang Bersifat Istimewa

Cara ini ditujukan kepada hal-hal yang dikecualikan dalam hal ini pengawasan dilakukan bila diterima laporan yang menunjukkan adanya peristiwa tertentu.

Sebagaimana kita ketahui tujuan dari proses pengawasan dalam suatu badan usaha ialah agar kegiatan individu dan kelompok yang bekerja di dalam badan usaha itu sesuai dengan syarat, sehingga pencapaian tujuan atau target terjamin.

BAB III

SUB DIVISI REGIONAL

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat

Pembentukan lembaga/ badan yang mengurus bahan makanan di Indonesia dimulai pada masa penjajahan dengan berdirinya VMF (Voeding Midden Fonds) pada tanggal 25 April 1939 di bawah naungan Departement Van Ekonomische Zaken, dengan tugas memberi, menjual dan mengadakan persediaan bahan makanan. Pada masa pemerintahan militer Jepang, VMF dibekukan dan sebagai gantinya di bentuk Lembaga Song Yoku Nango Kohatsu yang membeli padi secara langsung dari petani dengan harga yang sangat rendah.

Pada periode 1945-1950 terdapat dua organisasi yang menangani pengadaan dan penyaluran bahan pangan yaitu :

- a Di daerah Republik Indonesia, Jawatan Pengawasan makanan rakyat (PMR) dan tahun 1947-1948 terbentuk kementerian persediaan makanan rakyat.
- b Di daerah yang dikuasi Belanda, VMF dihidupkan kembali pada tahun 1938-1942 dan 1945-1950.

Pada tahun 1950-1952 oleh pemerintahan Republik Indonesia ex kementerian persediaan makanan rakyat (PMR) dirobah menjadi BAMA (Yayasan Bahan Makanan) di bawah kementerian pertanian guna melanjutkan usaha VMF yang memperoleh bantuan dalam bentuk kredit dari Bank Indonesia guna membiayai

Import dan pengadaan dalam negeri. Kemudian BAMA dengan surat Keputusan UNIVERSITAS MEDAN AREA

Menteri Perekonomian No. 1303/ M tanggal 2 Februari 1952 di pindahkan dari lingkungan Kementerian Pertanian ke dalam lingkungan Kementerian Perekonomian dengan nama Yayasan Urusan Bahan Makanan (YUBM).

Memasuki era orde baru Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 87 tahun 1966 tanggal 23 April di bentuk Komando Logistik Nasional (KOLOGNAS) sebagai akibat adanya krisis ekonomi akibat terjadinya peristiwa G-30 S/ PKI.

Pada tanggal 31 Agustus 1966 dengan Keputusan Presidium Kabinet Ampera No.11/ EK/ KEP/ S/ 1966, BUPP dilebur menjadi KOLOGNAS. Kepemimpinan negara dan bangsa pada waktu itu goyah dan hampir melumpuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat sehingga krisis ekonomi berjalan terus menuju pada puncaknya yakni pada waktu itu gudang BUPP kosong, persediaan devisa habis dan infasi mengganas.

Pada tahun 1967 dengan keputusan Presiden Republik Indonesia No.69/ 1967 KOLOGNAS dibubarkan dan pada tahun itu pula dengan keputusan Presidium Kabinet No.114/U/Kep tanggal 10 Mei 1967 dibentuk BULOG (Bahan Urusan Logistic) oleh keputusan Presiden No. 272/ 1967 dinyatakan sebagai “Single Financing Agency” (Pusat Kebutuhan Pangan).

Menjelang dimulainya REPELITA I (1 April 1969), BULOG dirubah dengan Keputusan Presiden No.11/ 1969 tanggal 22 Januari 1969 sebagai berikut :

- a Struktur organisasinya dirubah dan disesuaikan dengan mission barunya.
- b Mission tahun 1967 dirubah menjadi Buffer Stock untuk menjaga kestabilan

harga di pasar.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

c. Distribusi untuk golongan anggaran menjadi rutin

Untuk menyempurnakan struktur organisasi Bulog yang terakhir dilakukan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 39/ 1978 tanggal 6 November 1978 yakni tugas Bulog merumuskan sebagai Pelaksana Pengendalian hanya beras, gabah, gandum dan bahan pokok lainnya guna menjadi kestabilan harga bagi produsen maupun konsumen sesuai dengan Kebijakan Pemerintahan.

Untuk mendukung tugasnya, Bulog dilengkapi dengan seperangkat Depot Logistik (Dolog) di setiap propinsi, dan sub Depot Logistik di beberapa Kabupaten serta 322 unit gudang beras berkapasitas 3.500 ton per unit dan di bangun lagi sebanyak 40 unit gudang gula pasir berkapasitas 3.500 ton per unit yang tersebar di seluruh Indonesia.

Setelah adanya pemisahan antara Lembaga Menteri Negara Urusan Pangan dan Bulog, maka organisasi Bulog disesuaikan lagi seperti tertuang dalam KEPRES No. 50 tahun 1995, tanggal 12 Juli 1995 tentang Badan Urusan Logistik. Status Pegawai Bulog dan Dolog seluruh Indonesia terhitung mulai tanggal 1 April 1995 menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan KEPRES No.51 tahun 1995 tanggal 12 Juli 1995.

Guna lebih meningkatkan efisiensi tugas Badan Urusan Logistik dalam penyediaan bahan kebutuhan pokok dan memperlancar arus barang maka pemerintah melalui KEPRES No.45 tahun 1997 menetapkan tugas Bulog sebagai berikut :

“Mengendalikan harga dan persediaan beras dan guna baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka menjaga kestabilan harga dan mutu bahan

pangan (kebutuhan pokok) berdasarkan kebijaksanaan umum Pemerintahan.”

Pada awal bulan Januari 1998 dalam rangka mengatasi Krisis Ekonomi dan Krisis Moneter Indonesia telah diadakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Indonesia dengan IMF yang dituangkan dalam Letter of Intent tanggal 15 Januari 1998. Dengan adanya kesepakatan tersebut tugas pokok Bulog/ Dolog/ Sub Dolog mengalami perubahan melalui KEPRES No.19 tahun 1998 tanggal 21 Januari 1998 yang intinya menyebutkan bahwa tugas Bulog/ Dolog/ Sub Dolog hanya terbatas pada mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras saja, sedangkan komoditi lain diserahkan kepada mekanisme pasar.

Namun demikian guna lebih menjamin stabilitas harga pokok lainnya, maka sesuai dengan lanjutan kesepakatan bersama antara Pemerintah Indonesia dengan IMF tanggal 8 April 1998, Bulog/ Dolog/ Sub Dolog tetap di perkenalkan menangani komoditi selain beras (gula pasir, kedelai, tepung terigu, pakan ternak dan minyak goreng), namun dengan memperoleh perlakuan sama seperti swasta lain.

Salah satu Sub Depot Logistik adalah Sub Depot Logistik Wilayah I Lubuk Pakam yang berada di bawah naungan Dolog Sumatera Utara, sebagai badan pelaksana kebijaksanaan Badan Urusan Logistik dengan kawasan kerja meliputi Kotamadya Medan, Kotamadya Tebing Tinggi, Kotamadya Binjai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Tanah Karo. Dan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 tahun 2003 diganti menjadi Perusahaan Umum (PERUM), Bulog yang disebut dengan SUB DIVISI REGIONAL.

SUB DIVISI REGIONAL yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut SUB

DRIVE. SUBDRIVE dipimpin oleh seorang kepala yang mempunyai tugas
UNIVERSITAS MEDAN AREA

melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi PERUM BULOG di Wilayah kerjanya.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam SUB DVRE mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan publik
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang komersial
- c. Pengelolaan kegiatan-kegiatan di bidang administrasi dan keuangan
- d. Pengelolaan sumber daya bagi terlaksananya tugas SUB DIVRE secara berdaya guna dan berhasil guna
- e. Pelaksanaan hubungan kerja dengan Instansi Pemerintahan, Badan dalam di Wilayah kerjanya

2. Struktur Organisasi

Dalam rangka pencapaian tujuan yang terlalu di gariskan sebelumnya, maka SUB DIVRE isi regional I Medan harus mempunyai struktur organisasi yang jelas dan terperinci. Hal ini disebut mutlak di perlukan agar tidak terjadi tumpang tindih dan salah pengertian dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan bagan struktur organisasi SUB DIVRE yang sangat sederhana ini maka dapat dikatakan bahwa SUB DIVRE yang berkedudukan di Medan memiliki struktur organisasi yang disebut dengan organisasi garis dan staff.

Dengan adanya struktur organisasi tersebut berarti tugas setiap karyawan lebih ditentukan menurut fungsinya masing-masing. Untuk lebih jelasnya bagan organisasi

tersebut dapat dilihat sebagaimana dalam Gambar 1. Dari Gambar 1 terlihat jelas bahwa jenjang wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan dari atas ke bawah secara vertikal dan horizontal. Artinya kepala Sub Divisi Regional (KASUB DIVRE) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh wakil kepala SUB DIVRE yang bertanggung jawab langsung kepada KASUB DIVRE sebagai pemegang Komando. Sedangkan masing-masing kepala seksi bertanggung jawab kepada seksinya masing-masing. Setiap Kepala Seksi tidak mempunyai wewenang untuk memerintah dari seksi lain, tetapi hanya dapat memerintah bawahannya sendiri. Selanjutnya Kepala Seksi mempunyai beberapa karyawan.

Penempatan para Staf dilakukan menurut kebutuhan masing-masing Departemen dalam Instansi tersebut seperti :

1. Seksi Administrasi dan Keuangan
2. Seksi Pelayanan Publik
3. Seksi Komersial

Para Staf di atas dalam menjalankan tugasnya tidak mempunyai wewenang untuk membuat decision making, akan tetapi segala permasalahan harus terlebih dahulu dilaporkan kepada atasan. Setelah ada kata sepakat atau diputuskan, maka diberikan limpahan wewenang kepada bawahan. Garis kekuasaan pada sistem organisasi garis dan staf akan menurut garis lurus ke bawah, yakni wewenang dan tanggung jawab semakin kebawah semakin bertambah kecil.

Kebalikan dari pada sistem organisasi Garis dan Staf adalah decision making/ pengambilan keputusan di ambil dengan cepat, langsung oleh masing-masing kepala seksi tanpa kompromi dan musyawarah. Didalam pelaksanaannya wakil kepala mempunyai tugas mewakili kepala apa bila kepala mempunyai halangan dan untuk

hal yang rutin mengkoordinir para staf dalam melaksanakan tugas sehari-hari didalam bidang masing-masing.

Sistem pengawasan yang dilakukan pada Sub Divre I Medan selalu mengikuti struktur organisasi yaitu secara vertikal. Tetapi dalam pelaksanaannya kegiatan pengawasan berjalan secara horizontal antara satu bagian dengan bagian lainnya.

Pada struktur organisasi Sub Divre I Medan, dapat diterangkan tentang fungsi, tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Susunan organisasi Sub Divre terdiri dari :

1. Kepala Sub Divre
2. Wakil Kepala Sub Divre
3. Seksi pelayanan publik
4. Seksi komersial
5. Seksi administrasi dan keuangan
6. Gudang

1. Kepala Sub Divre

Mempunyai tugas :

- a. Memimpin Sub Divre regional sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. Membina sumber daya manusia Bulog dilingkungan Sub Divre Regional.
- c. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelayanan publik, komersial administrasi dan keuangan.
- d. Melaksanakan kerjasama dengan badan usaha lainnya atau instansi pemerintah.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/2/24

2. Wakil Kepala Sub Divre

- a. Pada Sub Divre Regional yang berkedudukan di Pulau Jawa kecuali Sub Divre Regional Madura, kepala dibantu oleh wakil kepala.
- b. Wakil kepala adalah unsur pimpinan yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada kepala.
- c. Wakil kepala mempunyai tugas :
 - Membantu kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Divre Regional.
 - Mewakili kepala apabila berhalangan

3. Seksi Pelayanan Publik

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan analisis harga persediaan dan angkutan serta perawatan dan penyaluran.

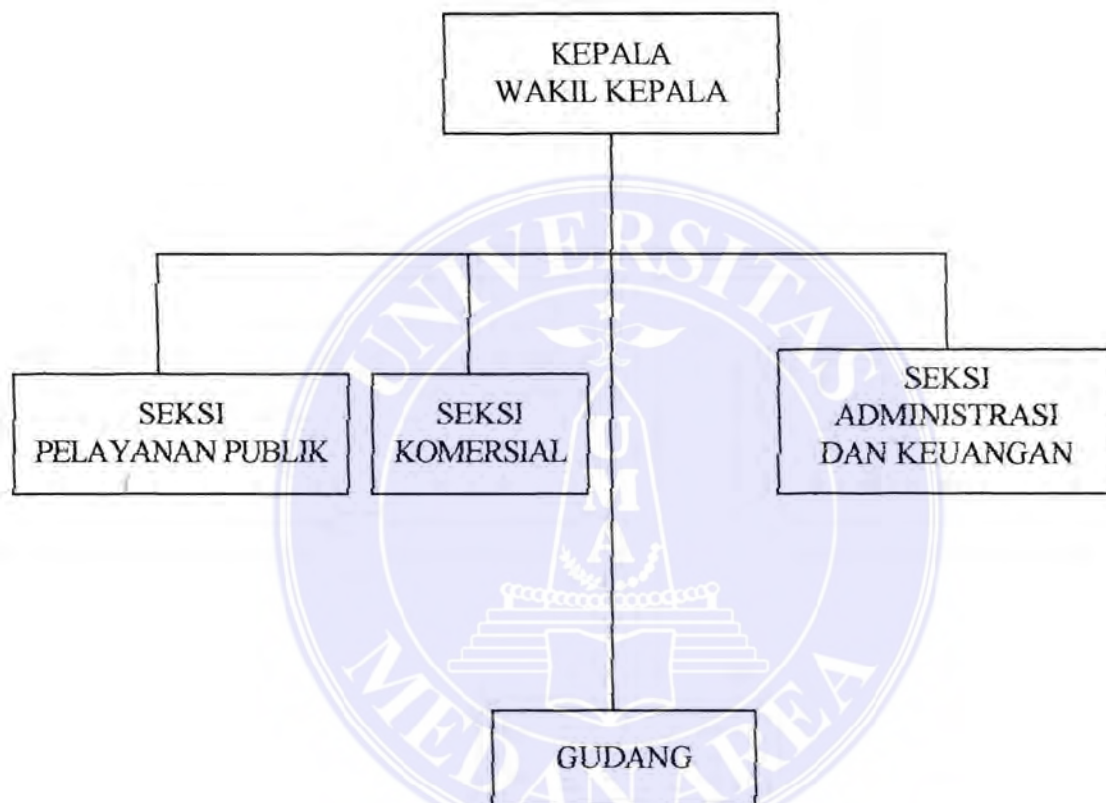
4. Seksi Komersial

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengolahan dan perdagangan serta jasa dan pengembangan pangan dan non pangan pembinaan unit usaha.

5. Seksi Administrasi dan Keuangan

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia dan hukum, ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta umum. Pengelolaan anggaran dan pembiayaan serta membuat laporan pertanggung jawaban.

STRUKTUR ORGANISASI SUB DIVISI REGIONAL



Gambar .1

Sumber : Sub Divisi Regional 1 Medan

Surat Keputusan Direksi

Nomor : Kep-01/Dirut/05/2003

Tanggal : 19 Mei 2003

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/2/24

B. Jenis-jenis Pengaturan Umum Persediaan

Jenis-jenis pengaturan persediaan beras meliputi :

1. Pengaturan Lokasi Gudang

Lokasi gudang harus baik dan strategis serta memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Lokasi gudang diusahakan strategis ditinjau dari segi produksi untuk pengadaan dan dekat dengan konsumen untuk penyaluran.
- b. Bebas banjir
Bagi lingkungan yang tinggi curah hujannya harus diusahakan sistem drainase/saluran air yang baik sehingga tidak ada air yang tergenang atau becek pada waktu hujan.
- c. Terpisah dari bangunan lain di sekitarnya, sehingga keamanan dan keselamatan barang yang disimpan lebih terjamin dan di samping itu tidak mengganggu keselamatan penduduk di sekitar.
- d. Diusahakan sedikit mungkin terkena sinar matahari langsung, karena radiasi panas yang terlalu kuat dapat merusak bahan yang disimpan.

2. Kondisi Gudang

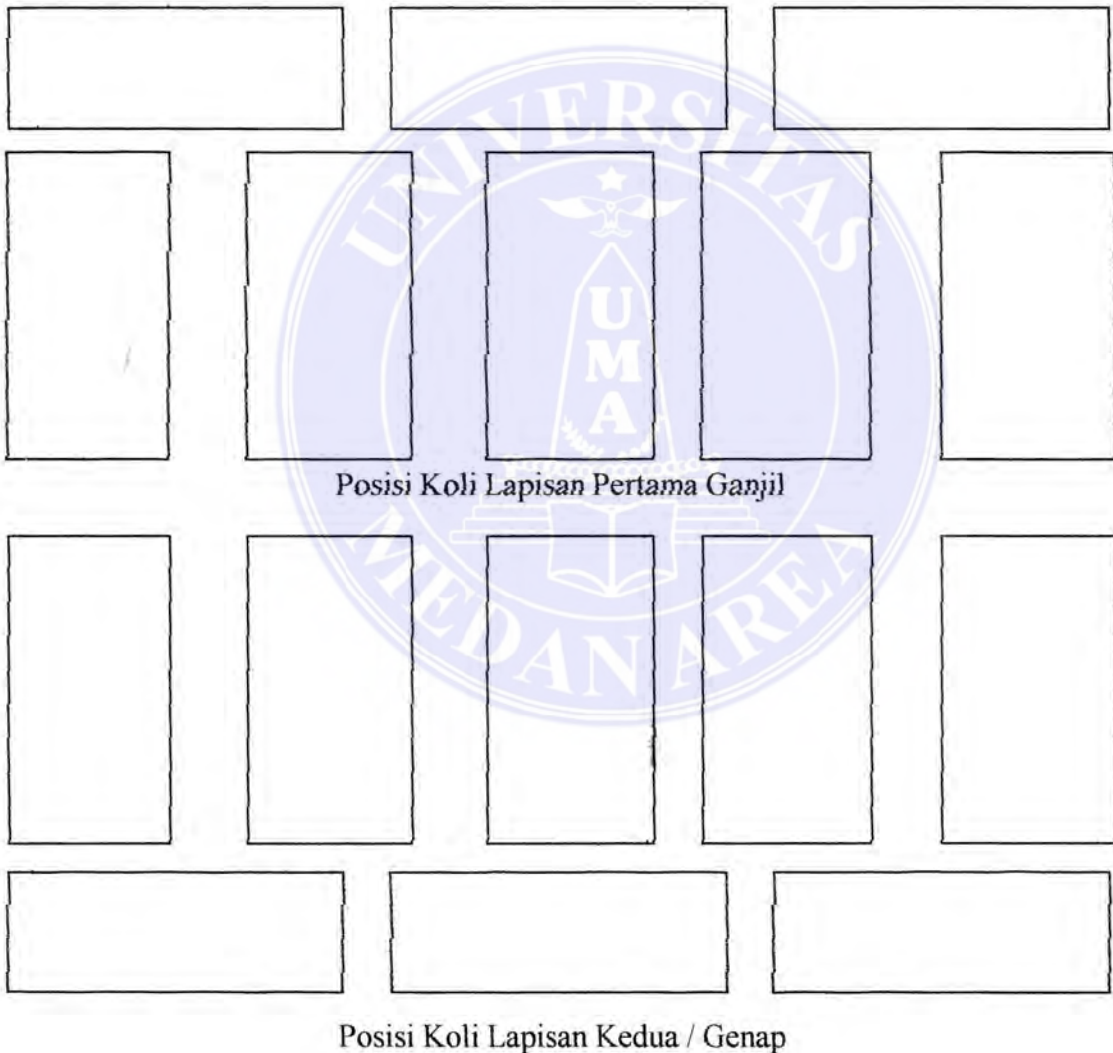
Untuk pengelolaan barang Bulog, kondisi bangunan gudang harus kokoh dan baik yang meliputi :

- a. Kerangka bangunan harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menjamin keselamatan barang yang di simpan dan keselamatan orang yang bekerja di gudang tersebut.
 - b. Dinding bangunan gudang harus cukup kokoh yang dapat berfungsi sebagai penahan panas serta aman dari kemungkinan pencurian.
 - c. Apta gudang sedapat mungkin terbuat dari seng atau bahan lain yang cukup kuat dan tidak bocor.
3. Perlengkapan gudang
- Gudang Bulog diusahakan memiliki peralatan yang cukup dan baik, di antaranya sebagai berikut :
- a. Alat timbangan yang ditera secara sah oleh Dinas Metrologi dan masih mempunyai masa berlaku.
 - b. Alat pemadam kebakaran yang cukup menurut jenis maupun jumlahnya.
 - c. Alat perlengkapan seperti alat pengambil contoh
 - d. Moisture tester untuk menganalisa/mengontrol kualitas kadar air dan higrometer untuk mengukur kelembaban udara.
 - e. Perlengkapan gudang lainnya yaitu :
 - 1) Pagar yang kokoh sekeliling gudang
 - 2) Gardu jaga untuk pengawasan keluar masuk barang.

4. Tumpukan Kunci Delapan

Penumpukan dengan menggunakan sistem kunci delapan adalah penyusunan koli-koli di gudang dengan posisi lapisan pertama pada lapisan kedua susunan dengan posisi sebelumnya dan seterusnya sampai lapisan teratas.

Contoh tumpukan kunci delapan



Gambar 2

Sumber : Sub Divisi Regional 1 Medan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

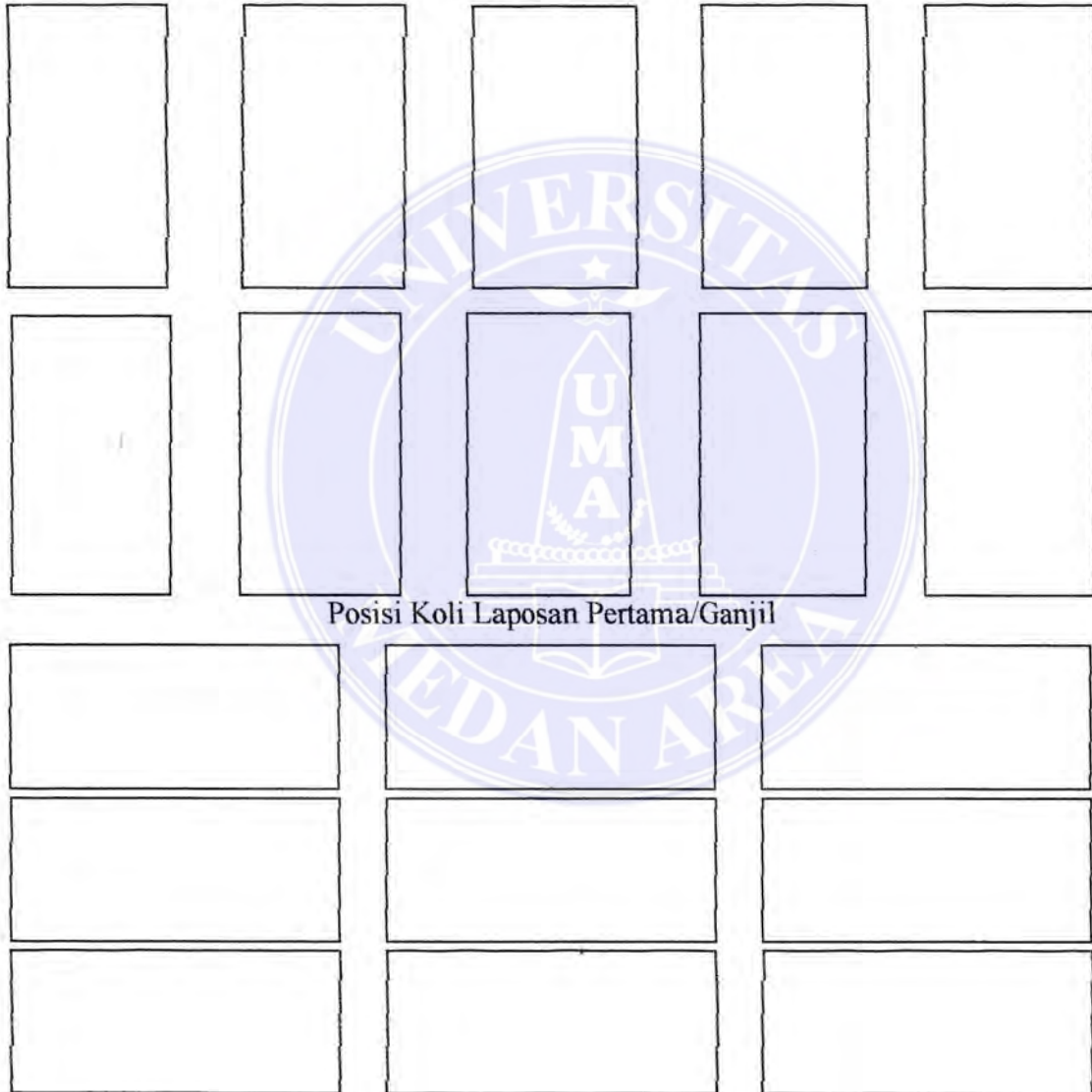
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/2/24

5. Tumpukan Bata Mati

Penumpukan dengan menggunakan sistem bata mati adalah penyusunan koli-koli di gudang dengan posisi pada lapisan pertama sejajar seluruhnya, pada lapisan kedua posisi kebalikan dari lapisan I, dan seterusnya sampai lapisan teratas.



Posisi Koli Lapisan Pertama/Ganjil

Posisi Koli Lapisan Kedua/Genap

Gambar 3

Sumber : Sub Divisi Regional 1 Medan

6. Tumpukan Kombinasi

Penumpukan dengan menggunakan sistem kombinasi adalah penyusunan koli-koli di gudang dengan mengkombinasikan antara kunci tujuh dengan kunci lima atau kunci delapan dengan kunci lima.

Dari jenis-jenis pengaturan persediaan yang dilaksanakan ada juga sistem pengawasan yang dilakukan Sub Divre yaitu :

1. Pencocokan sisa stock akhir bulan antara data yang dikerjakan operasional (alur) dengan neraca (minku).
2. Mengvaluasi data stock opname terakhir yang dilakukan oleh pengawasan atau pengawasan lainnya.
3. Membuat berita acara hasil pemeriksaan persediaan beras yang ditanda tangani kepala gudang dan pemeriksa.
4. Melakukan timbang uji perstafel untuk mengetahui berat rata-rata percolly, ini dilakukan dengan satu kali penimbangan terdiri dari 4 (empat) colly.
5. Adakan pemeriksaan dokumen secara uji petik untuk angka-angka mutasi dari tanggal neraca terakhir sebelum tanggal stock opname.

C. Model Pengawasan Persediaan

Sebelum suatu periode usaha dimulai, maka tugas pertama yang dilakukan manajerial adalah menyusun rencana. Rencana yang telah disusun harus dalam bentuk tertulis dan sistematis. Rencana-rencana tersebut antara lain dinyatakan secara

Adapun model pengawasan persediaan adalah :

a. Petunjuk pelaksanaan stock opname

1. Pengertian stock opname

Stock opname adalah kegiatan menghitung fisik barang (persediaan beras) di gudang dan membandingkan dengan catatan administrasi pada posisi persediaan tanggal tertentu.

Menghitung fisik barang (persediaan barang) pada dasarnya dilakukan dengan menghitung jumlah fisik barang, (persediaan barang) secara langsung dan teliti.

2. Prosedur stock opname

a. Persiapan stock opname

1) Kartu administrasi persediaan di kantor Sub Divre dan di kantor gudang harus dilakukan rekonsiliasi terlebih dahulu, untuk mendapatkan ketetapan dan kebenaran stock opname (pemeriksaan) maka terlebih dahulu harus dilakukan hal-hal sebagai berikut :

a) Menyiapkan posisi akhir persediaan operasi bulan sebelumnya diikuti oleh mutasinya sampai dengan tanggal dilaksanakannya stock opname.

b) Mengadakan rekonsiliasi persediaan operasional dengan persediaan fisik pada tanggal stock opname dimana persediaan operasional ditambah dengan DO yang masih harus dilayani (do out standing) sama dengan persediaan fisik.

2) Pada saat pelaksanaan perhitungan fisik, kegiatan operasional di gudang yang bersangkutan harus dihentikan sampai dengan selesainya perhitungan.

b. Pelaksanaan Penghitungan Fisik

1. Pelaksanaan stock opname harus dilakukan bersama-sama dengan petugas gudang.
2. Penghitungan fisik barang dilaksanakan dengan satuan kolli dan kilogram. Dalam menetapkan perkiraan berat bruto dan netti barang dari kolli utuh/standard, mengacu kepada rata-rata pemasukan perkolli perstaple.
3. Penghitungan stock opname dapat dilaksanakan dengan :
 - a. Menghitung jumlah kolli perstapel dari pandangan luar
 - b. Melakukan penimbangan barang
4. Penimbangan
Timbang dan hitung 100% dilakukan apabila :
 - a. Pelaksana stock opname menganggap perlu untuk timbang 100% karena tidak menyakini hasil stock opname dengan sistem di atas.
 - b. Terdapat dugaan atas terjadinya kekurangan/kehilangan, atau kecurangan lainnya.
 - c. Koli dalam keadaan kempes/rusak/tidak utuh lagi.
5. Biaya timbang dan hitung 100% menjadi beban Dolog/Sub Divre yang bersangkutan.
6. Pelaporan hasil stock opname

Hasil stock opname dituangkan dalam berita acara stock opname berikut

lampirannya sebagaimana format yang ditentukan.

6. Lain-lain

Dalam hal ditemukan adanya kekurangan, kehilangan dan kecurangan lainnya maka berdasarkan berita acara stock opname Ka. Dolog/Kasub Dolog melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah timbulnya kerugian bagi Dolog Sub Dolog yang lebih besar.

Untuk memastikan kekurangan dalam hal ini dapat dilakukan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Sasaran Pengawasan Persediaan

Dengan semakin berkembangnya kegiatan operasional Bulog/Dolog/Sub Divre dalam mengelola bahan pangan dewasa ini, maka perimbangan dengan peningkatan cara peningkatan pengawasan persediaan pada umum berupa pengawasan yang bersifat umum. Maka untuk mengimbangi peningkatan kegiatan operasi Bulog/Dolog/Sub Divre perlu meningkatkan pengawasan yang lebih teknis serta terarah pada bidang-bidang tertentu yang sangat potensial dalam menentukan misi Bulog/Dolog/Sub Divre dan sebaliknya sangat rawan pemborosan-pemborosan di dalam penyelewengan.

Berdasarkan pengalman secara sepintas, bidang pekerjaan yang sangat potensial berada pada bidang pekerjaan seperti pengadaan penggilingan, penerimaan import, penyaluran, personil yang sangat menentukan dalam keberhasilan tugas untuk mencapai keberhasilan misi Bulog/Dolog/Sub Divre.

Akan tetapi dari pengalaman yang selama ini justru di bidang ini masih sering ditemukan pemborosan bahkan penyelewengan yang merugikan Sub Divre.

Kiranya tidaklah berlebihan kalau disebutkan bahwa pengawasan dan pengendalian yang baik tercapai bilamana hasil pemeriksaan, seluruh penyimpangan dapat dijumpai dan sekaligus mengajukan saran perbaikan kepada pimpinan. Selanjutnya usaha para pelaksana untuk melakukan penyimpangan dapat dicegah atau dikurangi apabila para pemeriksa mengetahui titik lemah atau kerawanan sering terjadi dalam pelaksanaan operasi Bulog/Dolok.

Tercapainya pengawasan dan pengendalian yang baik sudah barang tentu para pemeriksa memahami cara penyimpangan, cara menemukan dan cara mencegahnya. Untuk itu pemeriksaan perlu memahami tentang metode prosedur dan teknik pemeriksaan atas sesuatu atau penyimpangan.

D. Proses Pengawasan Persediaan

Dalam pelaksanaan proses pengawasan persediaan oleh Sub Divisi Regional I Medan (Sub Divre) pada prinsipnya dijalankan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa rencana itu merupakan standar atau alat ukur dan pelaksanaan pekerjaan oleh bawahan, maka dalam proses rencana tersebut merupakan petunjuk apakah pekerjaan tersebut berhasil atau tidak. Dengan demikian perencanaan dan pengawasan merupakan dua unsur yang saling melengkapi, dimana dengan adanya perencanaan maka pengawasan persediaan dapat dilaksanakan, sebaliknya tanpa adanya pengawasan maka perencanaan tidak akan berhasil seperti apa yang diharapkan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kesimpulannya bahwa perencanaan dan pengawasan itu merupakan dasar untuk melaksanakan suatu pekerjaan sehingga pemimpin dalam mengambil keputusan bisa dengan tepat dan pelaksanaan pengawasan pun bisa lebih mudah. Kemudian proses selanjutnya pengawasan harus benar-benar dilaksanakan dengan seefektif mungkin, sehingga pemberian wewenang dan instruksi yang jelas kepada bawahan adalah suatu keharusan, dengan demikian para bawahan akan menjalankan tugasnya dengan baik dan berdasarkan itu pulalah dapat diketahui apakah bawahan dapat menjalankan tugas-tugasnya.

Sub Divisi Regional I Medan dalam menjalankan aktivitas pengawasan persediaannya melalui satuan pengawasan intern dalam proses dan prosedur yang ada.

Satuan pengawasan intern adalah unsur pembantu sebagai tugas dan fungsi Perum Bulog di bidang pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada satuan pengawasan intern yang dipimpin oleh seorang kepala.

Satuan pengawasan intern mempunyai tugas membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan operasional perusahaan serta menilai/pengendalian, pengurusan dan pelaksanaannya serta memberikan saran-saran perbaikan.

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud di atas satuan pengawasan intern mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengawasan di bidang operasi dan pengusutan tas penyimpanan serta

- b. Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengawasan di bidang pengembangan dan pengusutan atas penyimpangan serta penyalahgunaan.
- c. Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengawasan di bidang keuangan SDM dan umum dan pengusutan atas penyimpangan serta penyalahgunaan.

Dalam menjalankan Satuan Pengawasan Intern (SPI) membawahi jabatan fungsional pengawas. Jabatan fungsional pengawas berkedudukan di kantor pusat dan Divisi Regional.

Jabatan fungsional pengawas yang berkedudukan di kantor pusat dikoordinir oleh koordinator wilayah yang terdiri dari :

- a. Wilayah I, meliputi Kantor Pusat, Jakarta Raya dan seluruh Sumatera.
- b. Wilayah II, meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan seluruh Kalimantan.
- c. Wilayah III, meliputi Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, Papua dan seluruh Sulawesi.

Jabatan fungsional pengawas yang berkedudukan di Divisi Regional dikoordinir oleh koordinator.

Pengawas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pengawasan di bidang operasi, pengembangan, keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan umum.

Dalam menjalankan tugasnya pengawas dibagi ke dalam 3 bidang yaitu :

1. Bidang Operasi
2. Bidang Pengembangan
3. Bidang Keuangan, sumber daya manusia dan umum

E. Hubungan Pengawasan Dengan Persediaan

Seluruh persediaan/stock barang yang dikelola oleh Sub Divre seluruhnya dicatat/dilaporkan dalam organisasi persediaan dan seluruh kegiatan tersebut harus ditembuskan/diketahui oleh SPI (Satuan Pengawasan Intern) berarti dengan demikian hubungan antara pengawasan dengan persediaan tidak dapat dipisahkan karena seluruh persediaan tetap diketahui oleh pengawasan.

Adapun hubungan pengawasan dengan persediaan adalah :

1. Menjaga jangan sampai perusahaan sampai kehabisan persediaan sehingga dapat mengakibatkan terhentinya kegiatan produksi.
2. Menjaga supaya pembentukan persediaan oleh perusahaan tidak terlalu besar.
3. Menjaga agar pemberian secara kecil-kecilan dapat dihindarkan karena ini dapat berakibat biaya perusahaan menjadi lebih besar.

Jadi dengan diadakannya pengawasan terhadap persediaan diharapkan dapat membantu agar tercapainya suatu tingkat efisiensi penggunaan uang dalam persediaan. Tetapi perlu ditegaskan bahwa tidak berarti dapat melenyapkan sama sekali resiko yang timbul akibat adanya persediaan yang terlalu besar atau terlalu kecil, melainkan hanya berusaha mengurangi resiko tersebut menjadi sekecil

Pengawasan terhadap persediaan dapat dilakukan pada :

1. Pengawasan Physik
2. Pengawasan Akuntansi
3. Pengawasan jumlah yang dibutuhkan

Ad.1 Pengawasan Physik

Pengawasan terhadap benda fisik sangat penting dan bertujuan untuk menghindari kerusakan maupun pencurian terhadap bahan. Oleh karenanya dibutuhkan suatu tempat khusus penyimpanan bahan berupa gudang, baik keamana maupun keselamatan gudang itu. Di dalam gudang bahan-bahan diatur sedemikian rupa sehingga dapat dengan cepat diketahui bahan apa yang berkurang.

Ad.2 Pengawasan Akuntansi

Pengawasan ini timbul karena pencatatan jumlah persediaan pada waktu pembelian bahan dan penyimpanan proses produksi, sehingga apa yang terjadi di dalam gudang dapat diketahui tanpa pemeriksaan langsung ke gudang. Dengan demikian suatu saat kartu-kartu persediaan menunjukkan sisa tertentu dan tidak ada kekeliruan dalam pencatatan, maka seharusnya jumlah sisa tersebut harus cocok dengan jumlah sisa barang fisik di gudang.

Untuk menghasilkan pengawasan akuntansi efektif diperlukan pemisahan tugas antara orang yang bertanggung dengan orang yang mencatat kartu persediaan sehingga mereka akan saling mengawasi secara sadar.

Ad.3 Penyawasan jumlah yang dibutuhkan

Pengawasan ini timbul karena jumlah barang yang dibutuhkan sering tidak mencukupi dengan barang yang tersedia di gudang sehingga harga di pasar tidak terkendali.

F. Hambatan-hambatan yang Dihadapi Dalam Proses Pengawasan

Dalam menjalankan tugasnya Sub Divisi Regional I Medan selalu mendapatkan hambatan-hambatan yang berhubungan dengan pengawasan.

Walaupun pada saat ini upaya pengawasan terus ditingkatkan, tetapi masalah-masalah tersebut tetap ada, hanya saja dengan adanya pengawasan intern dan eksternal Dolog maka masalah tersebut dapat ditekan seminimal mungkin.

Adapun yang menjadi hambatan dari segi pengawasannya adalah :

1. Mengingat luasnya daerah Sumatera Utara dan lokasi pertanian yang berpencar-pencar, sehingga pihak pengawas dalam memantau perkembangan hasil pertanian di tingkat produsen sangat sulit untuk dilaksanakan secara rutin.
2. Di setiap Kabupaten terdapat daerah-daerah pertanian yang harus dipantau apabila saat panen raya.
3. Karena keterbatasan sarana dan prasarana serta jumlah personil yang terbatas sehingga kantong-kantong produksi pertanian tersebut sulit dijangkau secara menyeluruh.
4. Jumlah persediaan beras di gudang yang dimiliki Bulog sangat besar sehingga harus diadakan pengawasan rutin.
5. Karena kesibukan di gudang maka pemeriksaan tidak tepat waktu.
6. Jarak antara gudang dengan gudang lain berjauhan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan pembahasan atas data yang telah dibahas maka ditarik kesimpulan dan selanjutnya di berikan saran-saran yang dapat memberikan manfaat bagi kantor Sub Divisi Regional 1 Medan.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisis yang dilakukan ,maka penulis membuat beberapa kesimpulan :

- a. Sistem pengawasan persediaan pada Sub Divisi Regional 1 Medan sudah baik dan benar . ini dapat dilihat dari, tidak adanya persediaan digudang yang menumpuk terlalu besar yang mengakibatkan timbulnya kerugian berupa biaya perawatan /penyimpanan dan kemungkinan turunnya kualitas beras.
- b. Sistem persediaan yang dilakukan memakai metode Lifo yaitu harga barang yang telah terjual dinilai menurut harga pembelian barang yang terakhir masuk ,sehingga persediaan yang masih ada /stock dinilai berdasarkan harga pembelian barang yang terdahulu.
- c. Sistem pengawasan persediaan yang dilakukan terhadap kualitas persediaan kurang baik karenakesibukan digudang ,maka pemeriksaan terhadap kualitas persediaan tidak tepat waktu.

- d. Jarak antara gudang yang satu dengan gudang yang lain berjauhan sehingga mengakibatkan sulitnya melakukan pengawasan persediaan antara gudang yang satu dengan yang lain .
- e. Sistem pengawasan yang dilakukan Sub Devisi Regional I Medan:
 - Pencocokan sisa stok akhir bulan antara data yang di kerjakan operasinya dengan neraca.
 - Melakukan timbang uji perstapel untuk mengetahui berat rata – rata perkoli, ini di lakukan dalam satu kali penimbangan terdiri dari 4 koli.
- f. Sistem pengawasan persedian bertujuan agar jangan sampai terjadi kekurangan atau kehabisan stok, yang sarasanya dapat di salurkan kembali dalam rangka memenuhi kebutuhan para konsumen.
- g. Jenis pengawasan persedian yang di lakukan bersifat terus menerus sehingga kualitas persedian dapat terus di lakukan.

B. Saran

- a. Karena produksi bersifat musiman pimpinan perlu lebih meningkatkan pengawasan terhadap persediaan beras yang ada di gudang, jangan sampai stock (persediaan) yang ada sampai kehabisan sehingga pada musim paceklik tidak terjadi kekurangan beras di gudang.
- b. Untuk memperkecil harga beban yang di timbulkan oleh persedian yaitu biaya – biaya akibat pengadaan persedian sebaiknya pimpinan membuat suatu perencanaan yang lebih baik dengan di adakannya penjagaan yang ketat,

sewaktu mengadakan pembelian diteliti jumlah kadar serta beratnya berdasarkan perhitungan yang lebih ekonomis dan akurat

- c. Perlu adanya tambahan petugas pengawas yang di letakkan di bagian pergudangan sehingga pemeriksaan yang di lakukan di gudang tidak terlambat dan berjalan dengan waktu yang telah di tentukan .
- d. Tersedianya sarana angkutan bagi pengawas yang mana dengan adanya sarana ini dapat memudahkan kegiatan pengawasan walaupun menempuh jarak yang jauh antara gudang yang satu dengan gudang yang lainnya.
- e. Pemeriksaan Sub Divre akan lebih berperan aktif dalam pelaksanaan tugasnya gar tugas dan tanggungjawab sebagai aparat pengawasan di daerah dapat menjadi input (masukan) bagi atasannya.

